

ABSTRAK

Di era teknologi sekarang ini, PT. Pegadaian (Persero) (selanjutnya disebut “PT. Pegadaian”) senantiasa menampilkan layanan yang inovatif. Sebagai rumusan masalah: bagaimana pengaturan Pegadaian Digital Services (PDS) pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Semarang? Bagaimana pelaksanaan dan hambatan dalam penggunaan Pegadaian Digital Services (PDS) di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Semarang?. Tujuan penelitian: untuk mengetahui pengaturan Pegadaian Digital Services (PDS) di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Semarang, dan menganalisis pelaksanaan dan hambatan dalam penggunaan Pegadaian Digital Services (PDS) di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Semarang. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini ialah pendekatan yuridis empiris. Sifat penelitian pada penelitian ini ialah penelitian deskriptif analisis. Jenis data yang digunakan pada penelitian ini ialah data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka, wawancara dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Pengaturan Pegadaian Digital Services (PDS) pada PT. Pegadaian (Persero) sudah beberapa kali berubah status, yaitu sebagai Perusahaan Negara (PN), kemudian menjadi PERJAN, selanjutnya berubah lagi menjadi PERUM. Hingga pada tahun 2011, berdasarkan PP No. 51 tahun 2011 tanggal 13 Desember 2011, bentuk badan hukum Pegadaian berubah menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). Pengaturan pegadaian itu sendiri diatur dalam peraturan perundang-undangan. (2) Jika mengkaji dan memperhatikan pelaksanaan dan hambatan dalam penggunaan Pegadaian Digital Services (PDS) di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Semarang, maka dapat dikatakan bahwa dari pelaksanaannya tercermin adanya kepastian hukum karena pelaksanaannya didasarkan pada apa yang tersurat dan tersirat dalam peraturan perundangan yang mengatur PT. Pegadaian (Persero).

Kata Kunci: Pegadaian Digital Services (PDS), PT. Pegadaian (PERSERO), Cabang Semarang

ABSTRACT

In today's technological era, PT. Pegadaian (Persero) (hereinafter referred to as "PT. Pegadaian") always presents innovative services. As a formulation of the problem: how is the regulation of Pegadaian Digital Services (PDS) at PT. Pegadaian (Persero) Semarang Branch? How is the implementation and obstacles in the use of Pegadaian Digital Services (PDS) at PT. Pegadaian (Persero) Semarang Branch?. Research objectives: to determine the regulation of Pegadaian Digital Services (PDS) at PT. Pegadaian (Persero) Semarang Branch, and to analyze the implementation and obstacles in the use of Pegadaian Digital Services (PDS) at PT. Pegadaian (Persero) Semarang Branch. The research method used in this study is an empirical legal approach. The nature of the research in this study is descriptive analysis research. The types of data used in this study are primary data and secondary data. The data collection method is carried out by literature study, interviews and observations. The results of the study indicate that (1) Regulation of Pegadaian Digital Services (PDS) at PT. Pegadaian (Persero) has changed its status several times, namely as a State Company (PN), then became PERJAN, then changed again to PERUM. Until in 2011, based on PP No. 51 of 2011 dated December 13, 2011, the legal entity form of Pegadaian changed to a Limited Liability Company (Persero). The regulation of pawnshops themselves is regulated in laws and regulations. (2) If we examine and pay attention to the implementation and obstacles in the use of Pegadaian Digital Services (PDS) at PT. Pegadaian (Persero) Semarang Branch, then it can be said that its implementation reflects legal certainty because its implementation is based on what is written and implied in the laws and regulations governing PT. Pegadaian (Persero).

Keywords: Pegadaian Digital Services (PDS), PT. Pegadaian (PERSERO), Semarang Branch